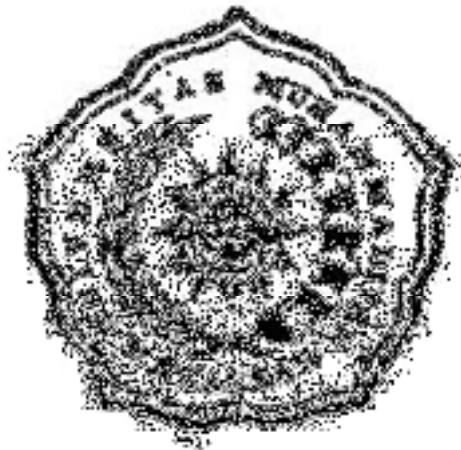


**PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN  
MASALAH PERSAMPAHAN DI KELURAHAN CAILE  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun Oleh :

**LISA ANJARSARI**

**Nomor Stambuk : 105640 2020 14**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Bulukumba"

Nama Mahasiswa : Lisa Anjursari  
Nomor Stambuk : 105640202014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

### Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahir, M. Si

Pembimbing II



Handam, S. IP, M. Si

### Diketahui Oleh:

Dekan

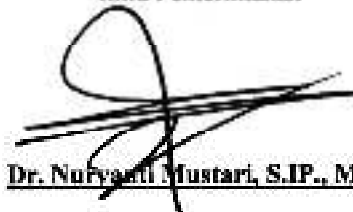
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos., M. Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurfitri Mustari, S.IP., M. Si

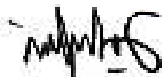
### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/PSP/A.3-VIII/1/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis Tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Ili Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

### Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (Ketua)



2. Abdul Kadir Advs, SH., MM



3. Dr. Muhammad Tahir, M. Si



4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : LISA ANJARSARI

Nomor Stambuk : 105640202014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 Februari 2019

Yang Menyatakan,



**LISA ANJARSARI**

## ABSTRAK

**LISA ANJARSARI. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.*** (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Handam)

Tujuan dari penelitian ini membahas tentang pengembangan kapasitas kelembagaan Badan keswadayaan masyarakat dalam Penanganan Masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Sampah merupakan masalah yang banyak di hadapi kota-kota di Indonesia termasuk di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, pihak swasta, serta masyarakat dalam penanganan masalah persampahan. Pelibatan masyarakat ini pemerintah bekerjasama dengan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi, dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis data menggunakan deskripsi kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pengembangan kapasitas sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, serta dana) sudah cukup baik; (2) Pengembangan kapasitas ketatalaksanaan atau operasional secara umum belum bisa dikatakan baik, karena BKM belum memiliki kelengkapan dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menjalankan berbagai kegiatan BKM Al-Ikhwan; (3) Pengembangan kapasitas struktur organisasi secara umum sudah baik; (4) Pengembangan kapasitas sistem pengambilan keputusan sudah baik.

## KATA PENGANTAR



*“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “*

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan ramat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari bapak Dr. Muhammad Tahir, M. Si sebagai pembimbing I dan bapak Handam, S. IP., M. Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau

merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M. Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Handam, S. IP., M. Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.

7. BKM Al-Ikhwan dan Kelurahan Caile beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak Abd. Karim, Ibu Suriani, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.
9. Untuk om Ulli dan Bulhe Ikha, adik kecil saya Muhammad Ali Nasir, dan Sepupuku Jusma Susanti dan Dina Firdaus, sapi-sapi yang telah menjadi sumbangsi materi, serta Keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku, Risla Harlina, Muzakkirah, Rhaehana Indah Kusuma Mahsyuri, Masriana, Rofidah, Dewi Sagita, Raihanah, St.Hawah, Ella Hasturi, Hasmilah, yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentiya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman 2014 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk kelas D, Gembel elit squad, dan Ijo Lumut.



12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, 07 Februari 2019

Penulis

**LISA ANJARSARI**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. PEMBAHSAN</b>	
A. Pengembangan Kapasitas ( <i>capacity building</i> ) .....	8
B. Pengembangan Kapasitas Masyarakat .....	16
C. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.....	18
D. Badan Keswadayaan Masyarakat.....	29
E. Kerangka Pikir .....	30
F. Fokus Penelitian .....	31
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisa Data.....	37
G. Pengabsahan Data .....	39

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba .....	51

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
C. DAFTAR PUSTAKA .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 1.1.....	31
------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	36
Tabel 2.1 .....	47
Tabel 2.2.....	48
Tabel 2.3.....	49
Tabel 2.4.....	50
Tabel 2.5.....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan permasalahan yang bukan hanya dihadapi di kota Makassar, tapi ini juga menjadi polemik yang tengah di hadapi kabupaten bulukumba. Pertambahan penduduk juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya produksi sampah. Volume sampah yang melebihi kapasitas daya tampung, manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif, hingga kurangnya dukungan dari kebijakan pemerintah dapat menyebabkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta estetika (dalam Rusmasondi, 2017: 34).

Seperti yang dikatakan Chaerul dkk (dalam Mahyudin, 2017: 67) bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, diantaranya yaitu dasar hukum yang tidak tegas, tempat pembuangan sampah kurang memadai, kurangnya usaha untuk melakukan pemomposan, dan kurangnya pengelolaan sampah di TPA dengan sistem yang tepat.

Proses pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang meninggalkan banyak permasalahan diantaranya adalah ketersediaan lahan untuk pembuangan akhirnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban penanganan sampah adalah dengan reduksi volume sampah yang harus ditangani. Konsep daur ulang sampah adalah salah satu solusi yang perlu juga

untuk dipertimbangkan, karena dalam sampah tersebut masih ada nilai ekonomis didalamnya yang dapat dimanfaatkan (Damanhuri, Enri 2006: 11).

Ditegaskan dalam UU No 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), produksi sampah di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 70 ton perhari. Dari 70 ton itu terdiri dari 69, 91% sampah organik dan 30, 01% sampah non organik. Masalah pun dirasakan karena sampah belum tertangani. Menurut Misbawati A Wawo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2017), hanya 37, 25% atau 20-26 ton perharinya jumlah sampah yang dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penanganan sampah, dikumpulkan dalam pewadahan kemudian diangkut lalu dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir (Makassarterkini, 2017).

Penanganan itu juga masih terbatas hanya di dua kecamatan, yaitu Ujung Bulu dan Gantarang, dari total sepuluh kecamatan yang ada di Bulukumba. Dari dua kecamatan itu pelayanan juga belum optimal, kita dapat melihat dari sumber dana dan sumber daya yang ada, dana yang dianggarkan dalam APBD 2017 mencapai Rp. 6,7 miliar. Jumlah tenaga kebersihan, mulai dari penyapu, operator motor/mobil samapah dan petugas sampah di TPA berjumlah 253 orang. Layanan tersebut dimulai dari rumah warga hingga sampai pengangkutan ke TPA (Makassar terkini, 2017).

Program pemerintah “Bulukumba Macakka” menjalin kerja sama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bulukumba, perusahaan/swasta, dan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dengan mengajak Badan Keswadayaan Masyarakat “BKM”. Adapun BKM yang diajak bekerja sama yaitu BKM Lestari Kelurahan Loka dan BKM Al-ikhwan Kelurahan Caile (Makassarterkini, 2017).

Ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 133 Tahun 2017 bahwa telah dibentuk unit pelaksana teknik kebersihan, pertamanan dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peterson (dalam Arnold, 2016: 4) memaknai kinerja kelembagaan sebagaimana lembaga menggunakan kemampuannya untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien kemudian dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya sejalan dengan kebutuhan pengguna, ada dua yang menjadi tolak ukur kinerja kelembagaan, yaitu prodaknya sendiri (jasa/material), dan faktor manajemen yang baik dapat menghasilkan sebuah produk.

Hapasari (2016) yang berjudul Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan organisasi BPBD Kabupaten Jepara dalam penanggulangan bencana perlu adanya peningkatan sumber daya, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini ialah pengembangan kapasitas kelembagaan BPBD



Kabupaten Jepara dalam penanggulangan bencana masih memiliki banyak kendala-kendala mulai dari kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang masih minim keahlian dalam penanggulangan bencana, anggaran yang terbatas, serta perlu adanya peningkatan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi untuk mencapai tujuan bersama.

Alam (2015) yang berjudul Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelaya Publik Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bone. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayan publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu pengembangan sumber daya fisik, pengembangan proses operasional, dan sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) pengembangan sumber daya fisik cukup baik, indikatornya terdiri dari sumber daya fisik, struktur organisasi, keuangan, perangkat hukum (aturan), sarana dan prasarana, perangkat hukum merupakan indikator yang mendapat penilaian kurang baik; (2) pengembangan kapasitas operasional (ketatalaksanaan) secara umum sudah baik dengan indikatornya yaitu prosedur kerja, budaya kerja, dan kepemimpinan; (3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia, indikatornya yaitu pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai, serta perilaku dan etika kerja.

Penelitian juga dilakukan oleh Ratnasari (2013) yang berjudul Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Kelembagaan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini menggunakan metode deskripti kualitatif. Ada dua yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Jombang, dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pada pengembangan kapasitas kelembagaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang sudah cukup memadai dengan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung, serta pegawai seharusnya lebih inovatif.

Ditegaskan dalam dokumen perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Kabupaten Bulukumba dengan BKM Al-Ikhwan tentang kerjasama pengelolaan persampahan Nomor 048/SPK/DLHK/1/2018, pada pasal 5 tentang operasional, bahwa warga dikenakan retribusi iuran sampah sebesar Rp. 7000,00.

Faktor manajemen yang baik dalam sebuah lembaga dapat menghasilkan sebuah produk yang baik pula. Salah satu yang menjadi pendukung dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile adalah dengan adanya dokumen RPLP Kelurahan Caile, dan dokumen standar operasional prosedur kerja BKM masih dalam proses pembuatan. (Sumber: wawancara langsung dengan koordinator BKM Al-Ikhwan Syahrul di BTN Somba 2 belakang stadion Bulukumba).

Retribusi iuran sampah masyarakat dikenakan biaya retribusi sampah sebesar Rp. 15.000,00-Rp. 25.000,00 perbulannya. Masih ada warga masih memilih membuang sampahnya sendiri dan tidak menerima pelayanan

sampah. Masih ada warga yang apatis dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile.(wawancara langsung dengan warga Kelurahan Caile Ike Nurjannah di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba).

Salah satu yang menjadi penunjang sebuah lembaga atau organisasi dalam pengembangan kapasitas ketatalaksanaan atau manajemen yaitu dengan adanya kelengkapan dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*), hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sutwanto dkk (dalam Alam, 2015: 100), bahwa dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien kemudian ada perangkat hukum yang melindungi dari segi hukum.

Melihat dari permasalahan yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)) dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Chaile Kabupaten Bulukumba”. Menurut peneliti pengembangan kapasitas kelembagaan juga perlu disoroti dilihat dari pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan BKM dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Chaile yang difokuskan pada pengembangan tingkat kelembagaan yang mencakup sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan bahwa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan BKM dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba?

#### **b. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan BKM dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

#### **C. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam kajian ilmu pemerintahan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Mengelolah Masalah Persampahan.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga lainnya dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengembangan Kapasitas (*capacity building*)

Secara sederhana kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Goodman (1998:21) yang menyatakan bahwa “*capacity is ability to carry out stated objectives*”. Lebih lanjut lagi Milen (dalam Alam, 2015: 95) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya secara efektif dan efisien secara terus menerus.

Morgan (dalam Alam, 2015: 95) mengatakan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan individu atau organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Ada berbagai macam pengertian atau definisi *capacity building* atau pengembangan kapasitas menurut para ahli antara satu dan yang lainnya, definisi para ahli ini sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya ini dikarenakan karena *capacity building* atau pengembangan kapasitas merupakan kajian ilmu yang multi dimensi, dapat dilihat dari

berbagai sisi bukan hanya satu sisi saja, sehingga sulit untuk mendapat pendefenisasiannya. Secara umum konsep *capacity building* atau pengembangan kapasitas adalah proses untuk membangun atau mengembangkan kapasitas individu, maupun kelompok atau organisasi (dalam Ratnasari, 2013: 105).

*Capacity building* atau pengembangan kapasitas dapat juga dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan atau kapasitas individu, kelompok atau organisasi dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, bakat serta dilakukan melalui penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi mampu bertahan menghadapi tantangan atau perubahan yang terjadi baik terduga maupun tidak terduga. *Capacity building* atau pengembangan kapasitas dapat pula dimaknai sebagai sebuah proses yang kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak (dalam Ratnasari, 2013: 105).

Menurut Grindle (dalam Ilato, 2017: 52), “*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*”. *Capacity building* (pengembangan kapasitas) adalah upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi untuk meningkatkan *efficienci* (dalam hal ini waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan untuk mencapai suatu *outcome*), *effectivene*

(berupa kepastian usaha yang dilakukan untuk hasil yang diinginkan) dan *responsiveness* (bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud yang ingin dicapai).

Lebih lanjut, Milen (dalam Arnold, 2016: 14) mengartikan *Capacity building* atau pengembangan kapasitas sebagai tugas yang khusus, karena tugas yang khusus tersebut terhubung dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem yang tertentu dan pada waktu tertentu pula.

UNPD (dalam Ginting, 2016: 107) memberikan pengertian dasar dalam *capacity building*: “sebagai kemampuan individu, organisasi atau kelompok untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan”. Pengertian ini memiliki tiga aspek penting, yaitu: (a) kapasitas bukanlah merupakan suatu keadaan yang pasif, tetapi juga merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. (b) bagaimana menekankan dan mendayagunakan SDM. Dan (c) dari konteks keseluruhan bagaimana organisasi melakukan tugas serta fungsi-fungsinya merupakan dari pertimbangan kunci dalam menentukan strategi pengembangan kapasitas.

Grindle (dalam Ilato Rosman, 2017: 40) juga berpendapat bahwa *capacity building* memiliki tiga level intervensi, yaitu:

1. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan pada sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

2. Level kelembagaan/institutional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, pada proses pengambilan keputusan pada organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
3. Level individual atau aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

World Bank (dalam Ginting, 2016: 107) menekankan perhatiannya pada *capacity building* atau pengembangan kapasitas pada: (a) pengembangan SDM (training, rekrutmen, pemutusan pegawai profesional, manajerial, dan teknis); (b) keorganisasian (meliputi pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen); (c) jaringan kerja atau *network* (meliputi koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, dan juga integritas baik formal maupun non formal); (d) lingkungan organisasi (berupa aturan dan berupa juga undang-undang yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi *development tasks*, dan dukungan berupa keuangan serta anggaran yang memadai); (e) lingkungan kegiatan yang lebih luas (yaitu faktor-faktor politik, ekonomi serta yang situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja).



Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKSI) (dalam Arnold, 2016: 11), mendefinisikan *capacity building* sebagai pembangunan atau peningkatan kemampuan kapasitas yang dilakukan secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan *output* dan *outcome* pada kerangka tertentu atau tujuan yang hendak dicapai.

Lebih lanjut ACBF (dalam Rainer Rohdewohld, 2005; 12) menjelaskan *Capacity Building* dalam yang lebih luas dan rinci bahwa:

*“Capacity building can be defined as a process to increase the ability of individuals, groups, organisations, communities or societies to. (a) analyse their environment, (b) identify problems, needs, issues and opportunities, (c) formulate strategies to deal with these problems, issues and needs seize the relevant opportunities, (d) design a plan of action, and (e) assemble and use effectively and on a sustainable basis resources to implement, monitor and evaluate the plan of actions, and (f) use feedback to learn lessons”.*

Pada penjelasan pengertian *Capacity Building* di atas ialah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok atau organisasi dan masyarakat untuk: (a) menganalisa lingkungannya, (b) mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan juga peluang-peluang, (c) dapat juga memformulasikan strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu serta kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan, (d) merancang sebuah aksi, dan juga mengumpulkan serta menggunakannya secara efektif, (e) atas dasar

sumber daya yang mengevaluasi rencana aksi tersebut, dan (f) memanfaatkan upan balik sebagai bahan pembelajaran.

Morrisn (dalam

Bappenas 2007 (dalam Alam, 2015: 98) menekankan pengembangan kapasitas itu: (a) memungkinkan dan membatasi atau pengatur bagi pemerintah daerah, dan dimana ada berbagai komponen sistem yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya; (b) tingkat kelembagaan atau etnitas, tingkat badan atau lembaga teknis, atau lembaga pengantar pelayanan atau *servicedelivery* dengan struktur organisasi tertentu, serta proses-prosee kerja dan budaya kerja; dan (c) tingkat individu, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, serta motivasi dan sikap kerja. Pengertian yang lebih jelasnya, ada tiga aspek pengembangan kapasitas, yaitu: (a) tingkat individu (meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika serta etos kerja); (b) tingkat kelembagaan (meliputi sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan); (c) tingkat sistem (meliputi perturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah).

Definisi di atas mengenai *Capacity buiding* sejalan dengan Leavit (dalam Alam, 2015: 97) berikut ini merupakan tingkatan dari pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatan individu mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika.

- b. Tingkat kelembagaan mencakup sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, serta dana), ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan).
- c. Tingkat sistem mencakup peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mendukung.

Menurut Keban (dalam Arnold, 2016: 6) *Capacity buiding* (pengembangan kapasitas) merupakan serangkaian strategi ditujukan untuk meningkatkan jumlah efisiensi,efektivias serta untuk meningkatkan responsifitas dari kinerja.

Selanjutnya, Brown (dalam Arnold, 2016: 9) mendefenisikan *Capacity building* atau pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut:

*“Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or systems to its stated purposes and objectives”*. Artinya adalah *Capacity building* atau pengembangan kapasitas merupakan kemampuan seseorang atau individu, baik organisasi maupun sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian Yap (dalam Arnold, 2016: 10) berpendapat yang sama mengenai *Capacity building* atau pengembangan kapasitas, menurutnya *capacity buiding* merupakan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan individu, group atau kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditetapkan.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*) (dalam Hapsari, 2016: 4) menekankan pada *capacity building* atau

pengembangan kapasitas ada tiga tingkatan yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu (1) sistem atau kebijakan yang terdiri dari peraturan perundangan dan kebijakan; (2) tingkatan organisasi atau lembaga terdiri dari sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan; (3) tingkatan individu atau sumber daya manusia (meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (dalam Hapsari, 2016: 4) Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional serta proporsional.
2. Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif serta positif berdasarkan dari nilai-nilai budaya luhur bangsa.
3. Peningkatan kapasitas pada anggaran dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas serta juga kuantitas pada pembangunan dan juga pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Peningkatan kapasitas pada sarana dan juga prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan tugas.
5. Pada penerapan standar operasi (*standard operating procedure*)
6. Peningkatan kapasitas pada tatalaksana penyelenggaraan tugas pokok dan juga fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah.

Elemen-elemen pada *capacity building* atau pengembangan kapasitas Garlick (dalam Dwiyanto, 2013: 43) yaitu sebagai berikut.

1. Membangun pengetahuan (mencakup peningkatan keterampilan, mewadahi penelitian dan juga pengembangan, serta bantuan belajar).
2. Gaya kepemimpinan.
3. Membangun jaringan (meliputi usaha untuk membentuk kerja sama serta aliansi).
4. Menghargai komunitas dan juga mengajak komunitas untuk mencapai tujuan bersama.
5. Memberikan dukungan informasi (kapasitas untuk mengumpulkan , mengakses serta mengelola informasi yang bermanfaat).

Kemudian Morrison (dalam Damayanti, 2015: 466), menjelaskan tujuan dari *capacity building* ialah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang bisa terjadi setiap waktu.

### **B. Pengembangan Kapasitas Masyarakat**

Pada pengembangan kapasitas disuatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pada pengalaman pengembangan kapsitas dalam sebuah komunitas belum tentu bisa berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal

itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero (dalam Mubarak, 2010: 53).

Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan.

Pemahaman mengenai pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terus menerus. Pada proses pengembangan masyarakat keluarannya merupakan bukannya akhir dimana pada saat tujuan sudah dikatakan tercapai, namun keluarannya harus berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus berkembang dan ketika usaha peningkatan kapasitas telah mencapai suatu tingkatan tertentu, maka akan muncul tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks dan lebih berat. Dalam siklus pengembangan masyarakat proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari masing-masing individu masyarakat.

Pengembangan masyarakat mencakup berbagai pelayanan sosial yang berdasarkan masyarakat mulai dari pelayanan preventif yang dilakukan untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan salah (*abused*) samapi pada pelayanan kuratif serta pengembangan pada keluarga yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (dalam Suharto, 2014: 37).

Kemudian Johnson (dalam Suharto, 2014: 37-38) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah spesialis atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat besar atau makro (*macro practice*).

Twelvetres (dalam Suharto, 2014: 37) mendefinisikan pengembangan kapasitas masyarakat yaitu “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*”. Artinya secara khusus pengembangan masyarakat bermaksud dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu atau yang tertindas baik yang disebabkan karena kemiskinan ataupun oleh diskriminasi kelas sosial, suku, agama, ras, kecacatan, gender, maupun jenis kelamin.

Menurut Payne (dalam Suharto, 2014: 39) pengembangan masyarakat diimplementasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam proyek-proyek Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) memungkinkan anggota masyarakat mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Melalui kampanye dan aksi-aksi sosial dapat memungkinkan kebutuhannya bisa dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang merasa bertanggung jawab.

### **C. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh mengenai kapasitas kelembagaan, mari kita pahami apa dulu kelembagaan. Tony dkk (dalam Arnold, 2016: 47) mengemukakan kelembagaan atau institusi pada

umumnya mengarah pada organisasi sebagai wadah maupun perantara. Organisasi dimanfaatkan sebagai tempat atau wadah, lalu lembaga dimaknai sebagai aturan main, kode etik, sikap maupun tingkah laku seseorang dalam sebuah organisasi maupun dalam sebuah sistem.

Ruttan dan Hayani (dalam Arnold, 2016: 47), Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang artinya aturan dalam sebuah organisasi atau kelompok masyarakat yang ingin membantu anggotanya supaya dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Lembaga yang dimaksud disini dibedakan kedalam dua jenis, yang pertama lembaga formal dan yang kedua lembaga non formal. Lembaga formal yaitu sekumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja yang rasional serta memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, memiliki struktur organisasi yang jelas, contohnya: pada partai politik, badan pemerintahan, dan lain sebagainya. Pada lembaga formal struktur organisasinya jelas yang menekankan pada kekuasaan, akuntabilitas, tanggung jawab dan bagaimana bentuk komunikasi berlangsung disertai dengan tugas masing-masing untuk anggota. Lembaga formal ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel (dalam Arnold, 2016: 47).

Lembaga non formal ialah kumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai yang hanya memiliki satu pemimpin atau ketua. Contohnya: Arisan ibu-ibu, kelompok belajar, dan



lain-lain. Pada lembaga nonformal tidak memiliki struktur organisasi yang lengkap (dalam Arnold, 2016: 47).

Kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), dipelajari dengan melihat bagaimana kelembagaan mampu mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Ada lima aspek yang menjadi tolak ukur dari kemampuan tersebut, kelima aspek itu adalah pertama strategi kepemimpinan (*strategic leadership*); kedua perencanaan program (*program planning*); ketiga manajemen dan pelaksanaannya (*mangement and axecution*), keempat alokasi sumber dana (*reseurce allocation*), dan yang kelima hubungan dengan pihak luar yaitu *kepada clients, partners, government policymakers*, dan *external donors*.

Milen (dalam Arnold, 2016: 48) mendefenisikan pengembangan kelembagaan kapasitas, merupakan penguatan organisasi atau tradisional lebih menfokuskan pada sumber daya pengembangan yang hampir seluruhnya membahas mengenai permasalahan sumber daya manusia, dan proses maupun struktur organisasi. Pendekatan moderen menguji pada semua dimensi kapasitas yang meliputi semua tingkatan diantaranya misi strategi, kebudayaan(*culture*), gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia (SDM), dana(keuangan), aset informasi, dan infrastruktur, dan interaksi dalam sistem yang lebih luas antara satu dengan yang lainnya.

Ratnasari (2016: 105) pada pengembangan kapasitas kelembagaan yang menjadi dimensi penguatan organisasi meliputi strategi, kebudayaan,

gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan juga infrastruktur.

Lebih lanjut lagi menurut Sedarmayanti (dalam Sari, 2014: 636) pengembangan kapasitas kelembagaan atau penetaan kelembagaan adalah bagian dari reformasi birokrasi dianggap sangat menentukan dan penting, serta dapat mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Suatu lembaga salah satu variabel yang dianggap penting pada proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi. Karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan tata kelembagaan pada tingkat masyarakat sehingga mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Outcome dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dan lingkungannya. Pengembangan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan adalah sebuah jawaban atas tuntutan pelayanan publik dan permasalahan untuk mealkukan perubahan

organisasi menjadi lebih baik menghadapi tantangan baik faktor lingkungan internal dan faktor eksternal organisasi (dalam Hapsari, 2016: 8)

Apabila dilihat berdasarkan PP No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah telah tercantun jelas pada Bab II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) (dalam Ratnasari, 2013: 106), yaitu:

(1) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup:

- a) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proposional;
- b) peningkatan kapasitas tatalaksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
- c) pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d) Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan
- f) penerapan standar prosedur operasi.

(2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a) penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departemensi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
- b) membenahi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya;
- c) perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu;
- d) penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintah serta pengembangan sumber penerimaan daerah;
- e) penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- f) penyediaan standar prosedur operasi dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dilihat dari beberapa substansi pasal di atas pada pengembangan kapasitas kelembagaan terdapat enam fokus meliputi struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, anggaran, sarana dan prasarana, serta prosedur kerja. Kemudian dalam penerapannya dilihat dari masing-masing instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan terdapat 6 (enam) fokus yakni, struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai, sarana

prasarana dan prosedur kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis aktifitas pada masing-masing fokus dilihat dari kebijakan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Ada beberapa indikator yang hendak dicapai dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya (Manusia, sarana dan prasarana serta dana)**

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tetapi juga non fisik. Menurut Alam (2015: 99), pengembangan sumber daya fisik ditekankan pada perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas serta fungsinya kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik, kapasitas sumber daya fisik yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sarana dan prasaran, serta dana.

Menurut Moh. Abdul Mukhyi (Almasri, 2016: 134), Sumber daya manusia setiap organisasi atau perusahaan, khususnya pada lembaga organisasi diperlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga kerja pada suatu organisasi.

Lebih lanjut lagi Snyder (dalam Prihantoro, 2012: 79), mengatakan bahwa manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai, dan ilmu perilaku menyiapkan banyak teknik dan program yang dapat menuntun

pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja sumber daya manusia.

Paulus dan Anantharaman (dalam Kalangi, 2015: 2), menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas organisasi. Oleh karena itu setiap organisasi atau lembaga disarankan untuk mengoptimalkan kinerja anggota yang lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal, dengan cara melakukan program pelatihan dan pengembangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dan proyek).

Pengertian sarana dan prasarana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya. Sedangkan menurut Drs. Kustadi Arinta (dalam Junaed, 2014: 59), dana adalah sejumlah uang yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu/mendapatkan

objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembahasan khusus yang di susun seebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri.

## **2. Ketatalaksanaan atau manajemen**

Ketatalaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara menjalankan sebuah organisasi atau lembaga. Ketatalaksanaan juga dapat dikatan sebagai manajemen atau pengelolaan.

Ditegaskan dalam Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2011, manajemen tatalaksana pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi. Penataan tatalaksana merupa kan suatu siklus perencanaan, pelaksanaan, pemberlakuan, serta monitoring dan evaluasi.

Djamarah (dalam Rahayu, 2015: 354) menjelaskan bahwa istilah lain dari manajemen adalah pengelolaan. Manajemen merupakan kata dari management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpin dan pengelolaan. Dari penjelesan teori ini dapat disimpulkan bahwa ketatalaksanaan dapat juga diartikan sebagai manajemen dan pengelolaan.

Lebih lanjut lagi Arikunto (dalam Rahayu, 2015: 354), menegaskan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atu pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisein.

Manajemen menurut Georgy Terry (dalam Anugerah, 2012: 3), adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Sutwanto dkk (dalam Alam, 2015: 100) mengungkapkan dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien kemudian dilengkapi dengan perangkat hukum yang dapat melindungi dari segi hukum.

### **3. Struktur Organisasi**

Menurut Stephen (dalam Hapsari, 2016: 5), mengatakan bahwa organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Sebuah organisasi mempunyai tiga komponen: kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kemudian Milen (Alam, 2015: 99), mengemukakan bahwa salah satu penguatan organisasi yaitu menfokuskan proses dan struktur yang dapat memengaruhi bagaimana organisasi tersebut dalam menetapkan tujuannya dan menyusun pekerjaannya secara intensif. Struktur organisasi yang baik dan tepat akan dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan



bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan(dalam Alam, 2015: 67).

Menurut Steers (dalam Gammahendra. F. Dkk, 2014: 3), struktur organisasi merupakan bagaimana mengatur sumber sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relative tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah lakuyang berorientasi pada tugas.

Kemudian Robbins (dalam Gammahendra. F. Dkk, 2014: 2) struktur organisasi ditetapkan ada tiga komponen yang merupakan inti dari dimensi struktur organisasi yaitu, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

#### **4. Sistem Pengambilan Keputusan**

Menurut Prof. Dr. J. Salusu, M.A.(2015: 29), Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi.

G . R. Terry (dalam Supriyono, 2012: 3),menegemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.

Sistem pengambilan keputusan yang di kemukakan oleh P. Siagian (dalam Supriyono, 2012: 3), adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data.

Kemudian Horold (dalam Ningsih. E. Dkk, 2017: 244), mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang ada.

Claude S. Goerge, Jr (dalam Ningsih. E. Dkk, 2017: 255), proses mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

#### **D. Badan Keswadayaan Masyarakat**

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah salah satu lembaga atau institusi masyarakat yang berbentuk paguyuban, kedudukan BKM itu sendiri sebagai pimpinan kolektif di tingkat desa atau kelurahan, BKM sendiri bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan secara kondusif dan partisipatif (dalam Lestari, 2013: 43).

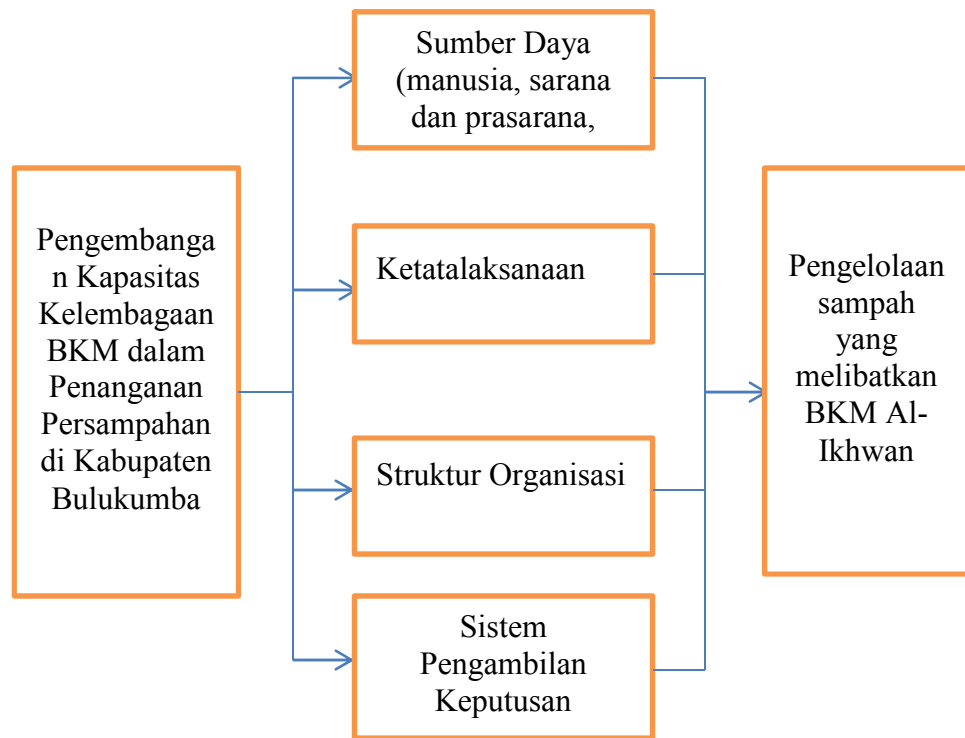
BKM sendiri bertujuan untuk membangun modal atau capital social dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama untuk kebaikan, demi kepentingan dan kebutuhan bersama kemudian akan memperkuat keswadayaan masyarakat (dalam Lestari, 2013: 34).

Samsudin (dalam Hidayat, 2016: 126) pelatihan dilakukan untuk mengembangkan masyarakat atau pengembangan SDM, terutama pada pengembangan intelektual dan kepribadian. Pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan atau keterampilan seseorang yang sudah menduduki jabatan tertentu atau tugas. Apapun jenis pelatihan atau tingkatannya pada dasarnya ditujukan untuk sebuah perubahan perilaku pada individu ataupun kelompok.

#### **E. Kerangka Pikirs**

Leavit mengatakan bahwa ada tiga tingkatan pada pengembangan kapasitas kelembagaan, diantaranya: (1) Tingkat individu (pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika); (2) Tingkat kelembagaan (sumber daya, (diantaranya: manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran atau dana), ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan); dan (3) Tingkat Sistem (peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung).

Sehubungan dengan fokus penelitian ini, maka peneliti merujuk pada teori Leavit tentang pengembangan kapasitas kelembagaan khusus pada tingkat kelembagaan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana), Ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

## F. Fokus Penelitian

Program “BULUKUMBA MACAKKA” merupakan program aksi bersih sampah yang melibatkan stakeholders di Bulukumba, baik lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bulukumba, pihak swasta atau perusahaan maupun masyarakat. Dalam pelibatan masyarakat ini , pemerintah menjalin kerjasama dengan BKM Al-Ikhwan Kelurahan Caile. Oleh karena itu fokus penelitan ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba yang mencakup sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan .

## **G. Deskripsi fokus penelitian**

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

### **1. Sumber daya**

Sumber daya dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja BKM Al-Ikhwan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Sumber daya mencakup manusi (pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika), sarana dan prasarana, serata dana.

### **2. Ketatalaksanaan**

Penataan tatalaksanaan yaitu manajemen BKM Al-Ikhwan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Manajemen ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemberlakuan monitoring, serta evaluasi.

### **3. Struktur organisasi**

BKM Al-Ikhwan sendiri memiliki struktur organisasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Dalam struktur organisasi itu sendiri terdapat tiga komponen yang menjadi

poin penting dalam sebuah organisasi, diantaranya kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi.

#### **4. Sistem pengambilan keputusan**

Pengembangan kapasitas kelembagaan BKM Al-Ikhwan dalam menangani masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, dalam proses pengambilan keputusan selalu melalui sebuah proses mencari alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah organisasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan dari tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 18 oktober 2018 dan lokasi penelitian bertempat di Kantor BKM Al-Ikhwan Kelurahan Caile, Kelurahan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Adapun alasan memilih objek lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin menegtahui bagaimana Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BKM dalam Penanganan Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BKM dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada kualitas dari tujuan sebuah penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di desain secara umum, untuk melakukan suatu pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan dapat berupaya dalam memahami suatu bahasa serta tafsiran tentang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BKM dalam Penanganan

Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Untuk itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi ialah pandangan berfikir yang difokuskan pada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan intervensi-intervensi dunia. Dalam pandangan fenomenologi peneliti berusaha memahami makna dari peristiwa dengan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tersebut, Moleong (dalam Sugiyono, 2013: 15).

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.



#### D. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 218-219) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang ingin diteliti. Berikut ini adalah nama-nama dari informan penelitian, yaitu:

Tabel 1.1. Daftar nama-nama informan.

NO	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Ramli, Sos., M. Si.	RAM	Staf DLHK/Direktur Bank Sampah	1 orang
2	Andi Lutfi Manafaluthy, Sos., M.Si.	ALM	Lurah Caile	1 orang
3	Syahrul	SYA	Koordinator BKM Al-Ikhwan	1 orang
4	H. Abd. Rahman, SE.	HAR	Lingkungan Caile	1 orang
5	Niswati, S. Pd.	NIS	Masyarakat	1 orang
6	Ike Nur Jannah	IKJ	Masyarakat	1 orang
Jumlah Informan				6 orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung, atau bagaimana melihat secara langsung pengembangan kapasitas kelembagaan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang dilakukan dua orang untuk saling bertukar informasi dengan sesi tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu, Esterberg (dalam Sugiyono, 2013: 231). Wawancara yang digunakan penulis disini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan serta informasi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan, dan wawancara bebas yaitu peneliti bebas mengajukan pertanyaan pada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa foto, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang dianggap mendukung.

## **F. Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain, Bogdan (dalam Sugiyono, 2013: 244).

Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui dalam teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah komponen yang pertama dalam analisis data yang dapat mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, serta dapat mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data dilakukan.

c. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang dapat memungkinkan kesimpulan secara singkat yang dapat berarti dalam cerita sistematis serta logis makna peristiwanya dapat dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan

## **G. Pengabsahan Data**

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan data dengan berbagai hal, sebagai berikut:

### **1. Perpanjangan Masa Penelitian**

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

### **2. Pencermatan Pengamatan**

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara, yaitu :

- a. Triangulasi Sumber, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan tidak akuratanya.
- c. Triangulasi Waktu, yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulukumba**

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1. 154, 67 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari kota makassar sekitar 154 km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20'' sampai 5°40'' Lintang Selatan (LS) dan 119°50'' sampai 120°28'' Bujur Timur (BT). Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ❖ Sebelah Timur berbatatasan dengan Teluk Bone;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara administratif Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan, 3 diantaranya termasuk sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale,

Kecamatan Bulukumpa. 7 Kecamatan lainnya termasuk kategori daerah pesisir sebagai sentra pengembangan wisata dan perikanan, yaitu Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang.

## **2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ujung Bulu, Kelurahan Caile**

Kecamatan Ujung Bulu merupakan Ibu kota Kabupaten Bulukumba yang memiliki luas 1.154,67 km<sup>2</sup>. Kecamatan ujung bulu memiliki. Kecamatan Ujung Bulu secara geografis terletak 120° 12'30" BT dan 5° 32'30" LS. Kecamatan Ujung Bulu Sendiri memiliki 9 Kelurahan, diantaranya Kelurahan Caile, Kelurahan Ela-ela, Kelurahan Bintatore, Kelurahan Kasimpureng, Kelurahan Loka, Kelurahan Bentengge, Kelurahan Terang-terang, Kelurahan Kalumeme.

Kelurahan Caile yang terletak di Ibukota Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kelurahan yang secara administrasi berada di kecamatan Ujung Bulu. Kelurahan Caile secara geografis terletak pada koordinat antara 119° 57' 10" BT dan 50° 33' 10" LS.

Secara administratif batas-batas wilayah Kelurahan Caile sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Polewali;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Terang-Terang;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalumeme;

- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Loka;
- ❖ Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kelurahan Ela-ela.

Luas wilayah Kelurahan Caile yang terletak di kota Kecamatan Ujung Bulu adalah 314.28 Ha. Jika dibandingkan dengan seluruh kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Bulu maka Kelurahan Caile menempati peringkat pertama terluas dalam hal luas wilayahnya.

### **3. Gambaran Umum BKM Al-Ikhwan Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba**

BKM Al-Ikhwan sendiri didirikan pada tanggal 07 juli 2005, dengan nomor akta: 23, dan didirikan oleh bapak H. Abd. Rahman dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. BKM Al-Ikhwan resmi didirikan pada tanggal 16 januari 2015 dengan dasar pembentukan anggota dari pemilihan warga dari tingkat RT, RW, tingkat Lingkungan, sampai dengan tingkat Kelurahan. Pada awal pemilihan anggotanya dibuatlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan dibentuklah pimpinan kolektif BKM Al-Ikhwan. Sekertariat BKM Al-Ikhwan berada di Jl. Kusuma Bangsa Kelurahan Caile.

Dasar pemilihan anggota BKM Al-Ikhwan dilihat dari ektabilitas(jujur, transparan, ikhlas, dan bertanggung jawab).

#### **a. Susunan Kelembagaan BKM Al-Ikhwan**

Koordinator : Syahrul

Sekretaris : Muh. Aris, ST.



Pimpinan Kolektif terdiri dari:

1. Syahrul
2. H. Abd. Rahman, SE.
3. A. Safiyuddin.
4. Saiful, SE.
5. Amrun Djalo.
6. Hasdir Aziz.
7. Zulfadili Akmal, S. Pd.
8. Muh. Amri.
9. Muh. Darwis.
10. Hj. Nur Daya.
11. A. Darmiah.
12. A. Herdin, S.Pd.
13. Masnaeni.
  - Unit Pengembangan Keuangan (UPK) : Ir. Nasrul
  - Unit Pengembangan Sosial (UPS) : A. Fahrival, S. Pd
  - Unit Pengembangan Lingkungan (UPL) : A. Darmia

#### **Visi dan misi BKM Al-ikhwan**

Visi : Menuntaskan kemiskinan yang ada di Kelurahan Caile

Misi :

1. Melakukan perubahan-perubahan yang ada di perumahan kumuh.
2. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, berupa bantuan keterampilan serta memberikan bantuan kepada usaha-usaha kecil.

3. Memberikan bantuan lingkungan kepada masyarakat, berupa bantuan infrastruktur seperti perbaikan drainase, pembangunan jalan setapak.
4. Memberikan bantuan ekonomi, berupa pemberian kredit makro kepada masyarakat miskin, memberikan mesin jahit dan mesin bordir kepada kelompok-kelompok usaha kecil.

**b. Susunan Kelembagaan KSM**

1. KSM Bersinar

Ketua : Hj. Rosni

Sekretaris : Asmiati

Bendahara : Masnaeni

Anggota :

- Fatma
- Mariani
- Martini

2. KSM Kamboja

Ketua : A. Muliati

Sekretaris : Muh. Darwis

Bendahara : Hj. Rosmi

Anggota :

- Takdir
- Ahmad
- Mirnawati

3. KSM Wahidin

Ketua : Renaldi

Sekretaris : Revaldi

Bendahara : Nur Jannah

Anggota :

- Wiwin
- St. Aminah
- Rahmat

#### 4. KSM Melati

Ketua : A. Rusmin, SE

Sekretaris : Muh. Fajri

Bendahara : Fatimah Rasyid, S. Pd

Anggota :

- Muh. Nasir
- Nur Fadillah

#### c. **Susunan Kelembagaan Bank Sampah Bank Sampah BKM Al-Ikhwan**

Direktur Bank Sampah : Salmah

Bendahara : 1. Masnaeni  
2. Hj. Rosmih

Divisi Administrasi dan pencatatan : 1. Hasmiati  
2. Martini

Divisi Penimbangan : 1. Rivaldi  
2. Alimin

Divisi Pemasaran : 1. Ismawati  
2. Ambo Tang

Divisi Komposting : 1. Marsidin  
 2. Burhanuddin  
 3. M. Nasir

**d. Keadaan Tingkat Pendidikan Pengurus Kelembagaan BKM Al-Ikhwan**

Tingkat pendidikan anggota lembaga menjadi penunjang penting dalam peningkatan kapasitas manusia dalam sebuah lembaga atau organisasi. Dengan kapasitas manusia yang prima atau yang baik akan mendorong terbentuknya kapasitas non manusia yang optimal. Kapasitas non manusia yang dimaksud disini adalah kapasitas sarana dan prasarana, dan dana.

Tabel. 2.1 Tingkat Pendidikan Anggota BKM Al-Ikhwan

NO	Lembaga	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S1	SMA	SMP	SD	
1	BKM	7 orang	7 orang	1 orang	-	15 orang
2	KSM	2 orang	10 orang	5 orang	3 orang	20 orang
3	Bank Sampah	-	7 orang	5 orang	-	12 orang
	Jumlah	9 orang	24 orang	11 orang	3 orang	47 orang

Sumber: BKM Al-Ikhwan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan setiap anggota BKM Al-Ikhwan ini dapat menambah kemajuan pada kapasitas lembaga. Tingkat pendidikan juga disini menunjang kemajuan pola pikir tiap anggota dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Pendidikan tinggi dapat memainkan peranan penting dalam penyediaan keterampilan dan penggunaan

teknologi. Kapasitas manusia BKM Al-Ikhwan disini telah cukup memadai untuk meningkatkan kapasitas lembaga.

**e. Keadaan Persampahan BKM Al-Ikhwan Kelurahan Caile**

Sistem pembuangan sampah di Kelurahan Caile telah menggunakan metode pengumpulan sampah yaitu dengan menggunakan tong-tong sampah gerobak dan container sebagai tempat penampungan sementara. Container berada di tempat strategis yang mudah didistribusikan ke lokasi TPA seperti kawasan perdagangan, perkantoran, dan pendidikan. Sedangkan keberadaan bak sampah atau tong-tong sampah tersebar diwilayah kawasan kota atau jalur-jalur jalan.

Dalam penanganan masalah persampahan BKM Al-Ikhwan di Kelurahan Caile, pengadaan sarana dan prasarana menjadi poin utama yang menjadi penunjang dalam keberhasilan penangan masalah persampahan, dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat juga membantu masalah kebersihan lingkungan. Sarana dan prasarana diantaranya:

Tabel. 2.2 Sarana dan prasarana persampahan BKM Al-Ikhwan di Kelurahan Caile

NO	Jenis Sarana	Jumlah/Unit
1	Bank sampah	1 unit
2	Motor pengangkut sampah	4 unit
3	Karung Sampah	30 buah/bulan
4	Tong Sampah	600 unit
	Jumlah	635 unit

Sumber: BKM Al-Ikhwan tahun 2018

Dana merupakan keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan programnya. Dana yang didapatkan BKM Al-Ikhwan itu sendiri dari retribusi sampah. Retribusi sampah dari tiap lingkungan, diantaranya:

Tabel. 2.3 Keadaan Retribusi Sampah/ Bulan

No	Lingkungan	Jumlah Permukiman/Rumah	Reribusi/Rumah	Jumlah
1	Lingkungan Caile	200 Unit Rumah	RP. 7000	RP. 1,400,000
2	Lingkungan Cendana	103 Unit Rumah	RP. 7000	RP. 721,000
3	Lingkungan Tanetea	102 Unit Rumah	RP. 7000	RP. 700,000
4	Lingkungan Matajang	89 Unit Rumah	RP. 7000	RP. 623,000
TOTAL				RP. 3,444,000

Sumber: BKM Al-Ikhwan

Penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabaupaten Bulukumba Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan BKM Al-Ikhwan.

Sistem pengambilan keputusan BKM Al-Ikhwan adalah hasil musyawarah dan mufakat dari ke 13 pimpinan kolektif, dari 13 orang ini diambil 1 orang sebagai koordinator. Koordinator mempunyai tugas sebagai pusat informasi. Dalam penanganan persampahan ini DLHK menyediakan motor pengangkut sampah beserta operatornya, serta disediakan tempat sampah di depan rumah setiap warga.

BKM Al-ikhwan sendiri didalamnya terdiri dari Unit Pengembangan Keuangan, yang bertugas memberikan dana bantuan kredit kepada masyarakat miskin. Unit Pengembangan Sosial (UPS), yang

bertugas memberikan bantuan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan lainnya, serta bantuan kepada pemilik usaha-usaha kecil. UPL (Unit Pengembangan Lingkungan), yang bertugas memperbaiki infrastruktur serta penanganan persampahan.

Penangan persampahan di Kelurahan Caile DLHK bekerjasama dengan KSM bersinar, dari sinilah sehingga lahir Bank Sampah.

#### f. Analisis Kebutuhan Persampahan di Kelurahan Caile

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kelurahan Caile juga akan memacu pertumbuhan timbulan sampah. Timbulan sampah pada Kelurahan Caile sebagian besar berasal dari sampah permukiman, yang terdiri pemukiman tersebut sebagian besar berupa sampah sisa hasil makanan atau sampah organik.

Indikator pengukuran: Timbulan sampah = Jumlah penduduk x 2 liter/hari/orang.

Berikut ini adalah analisis timbulan sampah di Kelurahan Caile 2016-2021, perhitungan besarnya timbulan sampah dilakukan dengan menggunakan standar dari Dinas Prasarana Wilayah yaitu 2 liter/orang/hari.

Tabel. 2.4 Estimasi Timbulan Sampah di Kelurahan Caile Tahun 2016-2021

Kelurahan	Tahun 2016		Tahun 2021	
	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (2 liter /hari/orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (2 liter/hari/orang)
Caile	9198	18396	9232	18464

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi timbulan sampah pada Kelurahan Caile pada tahun 2016 sebanyak 18.396 liter/hari dan pada tahun 2021 sebanyak 18.464 liter/hari.

Tabel. 2.5 Matriks analisis masalah persampahan

Masalah	Analisis	Solusi
Sebagian masyarakat masih membuang sampahnya di sungai, atau di lahan kosong	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah masih kurang.	Diperlukan pengadaan gerobak sampah.
90 % masyarakat tidak memiliki sampah	Tidak adanya pengelolaan sampah di masyarakat	Diharapkan mobil pengangkut sampah dapat mengangkut sampah

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2016

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa di tahun 2016 masalah persampahan di Kelurahan Caile menjadi polemik. Kemudian pada tahun 2017 DLHK dan BKM Al-Ikhwan bekerja sama dalam menangani masalah persampahan ini. Dalam kerja sama ini setidaknya masalah persampahan sudah mulai bisa teratasi. Bentuk sudah terealisasinya sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel. 3.

## **B. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Kesawadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba**

### **a. Sumber Daya (manusia, sarana dan prasarana, dana)**

Sumber Daya, (manusia, sarana dan prasarana, dan dana), pengembangan kapasitas Sumber Daya (manusia, sarana dan prasarana, dan dana) ditekankan pada perbaikan atau pengadaan sarana atau fasilitas, perbaikan kapasitas dana, untuk menunjang BKM Al-Ikhwan dalam



menangani masalah persampahan di Kelurahan Caile. Kapasitas kemampuan manusia sangat penting dalam penentuan kapasitas non manusia sebuah organisasi.

Kapasitas non manusia yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana, dan dana. Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Kapasitas dana atau dana yang memadai merupakan faktor penunjang organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari tahap penyusunan anggaran, pengalokasian anggaran, hingga pertanggung jawaban dan penyusunan laporan keuangan.

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi penunjang utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatkan kapasitas manusia dapat membuat tujuan organisasi akan mudah tercapai. Kapasitas sumber daya manusia BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile ditekankan pada kapasitas pengetahuan dan kapasitas keterampilan.

Berikut ini hasil wawancara dengan staf DLHK/Direktur Bank Sampah, yang membahas tentang masalah kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana)

“Ada dua BKM yang terlibat di kabupaten Bulukumba ini yaitu BKM Al-ikhwan dan BKM Lestari dan di Desa BUNDES. Masyarakat juga ikut berpartisipasi, walaupun dari mereka masih

ada yang masih cuek. DLHK sendiri tidak mendanai kegiatan BKM Al-Ihwan karena BKM memiliki mitra sendiri, fasilitas dari DLHK sendiri berupa motor pengangkut sampah beserta operatornya, dan karung yang digunakan sebagai tempat sampah. Gaji operator itu sendiri dari DLHK. Pembangunan bank sampah sendiri didanai oleh DLHK. Penangan persampahan ini ada juga bimteknya atau bimbingan teknologinya (Hasil wawancara, RAM. 28 September 2018).”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah dalam penanganan persampahan melibatkan masyarakat, ada dua BKM yang bekerjasama dengan DLHK, yaitu BKM Al-Ikhwan dan BKM Lestari yang menjadi percontohan.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba, meskipun masih ada warga yang memiliki kepedulian yang kurang.

DLHK juga mengadakan sarana dan prasarana berupa motor pengangkut sampah beserta operatornya dan pendanaan pembangunan Bank Sampah. Dengan adanya fasilitas yang diberikan DLHK kepada BKM menunjukkan bahwa pengadaan sumberdaya non manusia sudah terpenuhi. Walaupun DLHK tidak mendanai kegiatan BKM Al-Ikhwan karena BKM Al-Ikhwan memiliki mitra sendiri. Wawancara di atas menunjukkan bahwa kapasitas manusia, kapasitas sarana dan prasarana, dan dana sudah terpenuhi.

Bimbingan tekhnisi yang dilakukan DLHK kepada BKM menunjukkan bahawa dalam penaganan persampahan kualitas manusia dan kreativitas diwujudkan dalam pelatihan-pelatihan yang dapat

membantu pengetahuan anggota BKM dalam penanganan masalah persampahan.

Bimtek (bimbingan teknis) atau pelatihan adalah pengembangan pengetahuan dan pelatihan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga maupun individu. Bimbingan teknis yang diikuti setiap anggota lembaga diharapkan mampu memberikan manfaat orientasi pada kinerja. Semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan maka semakin tinggi pula kebutuhan pelatihan sumber daya manusia.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala lurah Caile, yang membahas tentang kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana):

“Masyarakat semua ada yang merespon dan ada yang merespon dan ada yang tidak, disinilah bentuk seninya bagaimana partisipasi masyarakat maupun BKM. Peran aktifnya dalam penanganan masalah persampahan ini bukan hanya proses retribusi tapi bagaimana sampah ini bisa dikelola, bagaimana bisa didaur ulang sehingga ada nilai ekonomisnya. Kemudian ada retribusi untuk warga dari PEMDA sebesar Rp. 5.000., dan dari BKM itu sendiri sebesar Rp. 2000., jadi retribusi yang harus dibayar warga itu sebesar Rp. 7.000. (Hasil wawancara, ALM. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa warga tidak peduli atau apatis dengan penanganan sampah, dari ketidakpedulian itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BKM dan Pemerintah setempat dalam penanganan masalah persampahan. Dengan adanya sosialisasi mengenai penanganan persampahan yang dilakukan bagi pemerintah dan BKM kepada masyarakat ini menjadi sebuah solusi agar

semua masyarakat mau ikut serta dalam penanganan masalah persampahan ini.

Kemudian masalah pendanaan kegiatan penanganan persampahan di Kelurahan Caile diambil dari biaya retribusi sampah. Dana juga merupakan salah satu penunjang utama lembaga dalam menjalankan program kerja atau kegiatan. Kapasitas manusia dan kapasitas dana sudah cukup baik.

Berikut hasil wawancara dengan Koordinator BKM Al-Ikhwan, yang membahas tentang kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana:

“BKM sendiri membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Bersinar yang khusus menangani masalah persampahan. Ada yang menjadi lingkungan percontohan di lingkungan Matajang yang terdiri dari 2 RW dan 4 RT, dari lingkungan percontohan inilah di bentuk Bank Sampah. Dari sampah-sampah ini, ada sampah yang membutuhkan kreatifitas tangan dan juga pemomposan. Daur ulang sampah ini menghasilkan kerajinan tangan seperti pot bunga dari botol aqua, bunga dari plastik, sajadah dari pembungkus mie. Dari pengelolaan sampah ini kami belum melangkah ke gas metan, kami hanya fokus di daur ulang. Dalam BKM semua anggota juga mengikuti beberapa pelatihan, seperti pelatihan mengelola keuangan, lingkungan dan sosial(Hasil wawancara, SYA. 27 September 2018).”

Sesuai dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penanganan sampah ini ada yang menjadi lingkungan percontohan di Kelurahan Caile dan sampah dikelola menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis, dari pengelolaan sampah ini menjadi kerajinan tangan dan dengan adanya Bank Sampah dapat membantu ibu-ibu rumah tangga menambah biaya kebutuhan sehari-hari.

Sampah juga didaur ulang menjadi pupuk kompos, dimana pupuk kompos ini bisa digunakan petani untuk menghemat biaya yang perlu dikeluarkan untuk membeli pupuk. Ini menunjukkan bahwa kapasitas manusia sudah cukup baik, sudah ada pengetahuan dan kreativitas BKM Al-Ikhwan dalam pengelolaan sampah.

Pelatihan pengelolaan keuangan, lingkungan, sosial, perlu lebih ditingkatkan BKM Al-Ikhwan kepada setiap anggotanya agar setiap anggota dapat mengerti tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan pelatihan-pelatihan ini dapat lebih meningkatkan kapasitas manusia yang dimiliki oleh BKM Al-Ikhwan. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan setiap anggota BKM sudah bisa meningkatkan kapasitas sumber daya.

Berikut ini wawancara dengan warga pemilik sampah Kelurahan Caile, warga mengatakan:

“Saya sendiri membayar biaya retribusi sampah itu sebesar Rp. 15.000,00 sampai Rp. 25.000,00 per bulannya. Menurut saya kapasitas Sumber Daya BKM Al-Ikhwan dalam menangani masalah persampahan dari segi sarana kami sediakan satu tong sampah, kemudian para warga yang kurang mampu juga sering mendapatkan bantuan dari BKM Al-Ikhwan (Hasil wawancara, INJ. 27 September 2018).”

Wawancara disini penulis dapat melihat bahwa selain menangani masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba ada juga kegiatan sosial yang dilakukan BKM Al-Ikhwan untuk membantu masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata dan warga Kelurahan Caile membayar retribusi iuran sampah.

Bantuan kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa visi dan misi BKM Al-Ikhwan telah tercapai untuk melakukan perubahan-perubahan di permukiman kumuh. Dari hasil wawancara ini penulis menarik kesimpulan bahwa kapasitas manusia sudah cukup baik.

Pada pernyataan warga disini menunjukkan bahwa pembayaran retribusi sampah menunjukkan tidak ada sinkron atau tidak sejalan dengan apa yang sebelumnya disepakati DLHK dengan pihak BKM yang menyatakan bahwa setiap warga dikenakan biaya retribusi sampah sebesar Rp, 7000,00/unit rumah. Pimpinan kolektif seharusnya juga melakukan evaluasi dan pengawasan kepada setiap anggota BKM Al-Ikhwan mulai dari Unit Pengembangan Keuangan (UPK), Unit Pengembangan Sosial (UPS), Unit Pengembangan Lingkungan (UPL), dan kepada semua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), untuk menghindari hal demikian.

Pengadaan sarana berupa tempat sampah yang hanya ada satu, tentunya itu masih kurang efektif, karena ada berbagai jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik, dan seharusnya disediakan tempat sampah di jalan.

Berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat pemilik sampah Kelurahan Caile, yang membahas mengenai kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana):

“Menurut saya dengan adanya penanganan masalah persampahan ini masyarakat yang ada di kelurahan caile itu diberdayakan, karena masyarakat diajarkan oleh BKM membuat kerajinan tangan dari sampah plastik itu sendiri yang bernilai ekonomi, selain itu

daerah tempat tinggal saya juga menjadi jauh lebih bersih (Hasil wawancara, NIS. 27 September 2018).”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada juga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKM Al-Ikhwan. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pemberdayaan ini menandakan bahwa kapasitas manusia BKM Al-Ikhwan sudah cukup baik.

Adanya pemberdayaan masyarakat berarti menunjukkan kapisitas sumber daya manusia dalam megelola atau memberdayakan manusia yang ada, dengan kapasitas manusia yang menunjang menunjukkan bahwa sebuah lembaga dalam menjalankan visi dan misinya dapat tercapai dengan mudah.

#### **b. Ketatalaksanaan**

Kapasitas ketatalaksanaan atau pengelolaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan visi dan misinya. Pengembangan kapasitas ketatalaksanaan atau manajemen dapat dilihat dari bagaimana pengembangan kapasitas pengelolaan, pengawasan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba. Dalam menjalankan kegiatan persampahan yang dilakukan BKM Al-Ikhwan perlu ketersediaan buku atau dokumen panduan operasional yang sangat membantu anggota BKM Al-Ikhwan dalam menangani masalah

pesampahan. Dan diperlukan perlindungan hukum yang dalam penanganan masalah persampahan ini.

Berikut ini hasil wawancara dengan staf DLHK, yang membahas tentang kapasitas ketatalaksanaan:

“Kegiatan yang dilakukan BKM Al-Ikhwan muncul ide untuk membuat Bank Sampah, dari BKM Al-Ikhwan ke Bank Sampah. BKM membentuk KSM, KSM itu sendiri merupakan turunan atau anak dari BKM Al-Ikhwan. KSM inilah yang bekerjasama sehingga dibentuklah Bank Sampah, tetapi Bank Sampah yang ada di BKM Al-Ikhwan itu sendiri bukan merupakan induk tapi unit. Pusat Bank Sampah itu sendiri ada di BKM Lestari (Hasil wawancara, RAM. 28 September 2018).”

Wawancara di atas menjelaskan bagaimana bentuk kerjasama antara BKM Al-Ikhwan dengan DLHK. Seperti yang dilihat di atas bahwa ada mekanisme kerja antara BKM dengan DLHK sehingga terbentuklah Bank Sampah.

Kapasitas ketatalaksanaan atau pengelolaan sudah bisa dikatakan baik apabila ada paduan kerja atau dokumen SOP(Standard Operating Procedure) dan landasan hukum yang dapat melindungi prosedur kerja tersebut. Kapasitas prosedur kerja ini menjadi tolok ukur keberhasilan BKM Al-Ikhwan dalam menangani persampahan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Lurah Caile, yang membahas tentang kapasitas ketatalaksanaan:

“Yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan masalah persampahan ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat, dan kegiatan BKM selalu menunggu dari pusat. Ada dana hibah atau investasi yang dikelola KSM dan dipantau oleh BKM supaya dana bantuan itu bisa berjalan. Kerjasama BKM dengan DLHK dari tahun 2017 dan ada MOU nya. Terkait masalah pembangunan



leading sektornya dari Dinas Tata Ruang (Hasil wawancara, ALM. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam penanganan persampahan di Kelurahan Caile ini memiliki hambatan yang disebabkan oleh masih ada masyarakat yang kurang peduli atau apatis dalam penanganan sampah ini. BKM Al-Ikhwan selalu menunggu dari pusat untuk menjalankan program-programnya. Ada juga dana bantuan yang dikelola oleh BKM, dan investasi ini yang dikelola di gunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Disini dapat dilihat bahwa kapasitas ketatalaksanaan sudah berjalan dengan cukup baik karena memiliki landasan hukum.

MOU(memorandum of understand) dalam bahasa indonesia sendiri adalah nota kesepahaman dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat dalam penanganan masalah persampahan ini. Walaupun MOU sendiri tidak sekuat dengan dokumen perjanjian tapi memiliki landasan yuridis yang artinya memiliki kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan. Selain itu, MOU juga berlaku sebagai undang-undang bagi setiap pihak yang membuatnya.

Faktor pendukung merupakan salah satu penunjang utama sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan semua kegiatannya dan program-programnya. Yang menjadi faktor pendukung BKM Al-Ikhwan dalam menjalankan ketatalaksanaan atau pengelolaan sudah ada perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak BKM Al-Ikhwan yang memiliki landasan hukum.

Wawancara sebelumnya peneliti dengan warga menunjukkan bahwa tidak ada sinkronisasi antara kesepakatan DLHK dengan pihak BKM mengenai retribusi biaya sampah dengan masyarakat, ini menunjukkan bahwa ada masalah besar yang dihadapi BKM kepada masyarakat terkait masalah transparansi dalam pemungutan biaya, padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya yang telah disepakati. Seharusnya pimpinan kolektif lebih mengawasi lagi kinerja-kinerja yang dilakukan KSM(Kelompok Swadaya Masyarakat) yang bertugas di bidang lingkungan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Koordinator BKM Al-Ikhwan, yang membahas tentang kapasitas ketatalaksanaan:

“Kerja sama BKM Al-Ikhwan dengan DLHK ini ada MOU nya. Tidak ada yang menjadi masalah dalam penanganan masalah persampahan ini, dan yang menjadi pendukungnya dengan adanya dokumen RPLP kelurahan caile yang menjadi pendukung utamanya. Dan dokumen SOP masih sementara proses pembuatan. Yang memonitoring masalah persampahan ini, ada yang namanya fasilitator, ada beberapa teman yang conec langsung di wilayah makassar, inilah yang dinamakan askot mandiri. Pada proses pengambilan sampah, KSM lah yang bertugas memonitoring petugas persampahan yang ada di lingkungan tertentu, di Kelurahan Caile itu sendiri ada yang menjadi percontohan. (Hasil wawancara, SYA. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan ada perjanjian legal yang dilakukan oleh DLHK dengan BKM Al-Ikhwan dengan adanya MOU ini menjadi landasan hukum bagi perjanjian antara BKM Al-Ikhwan. Menurut koordinator BKM Al-Ikhwan sendiri penanganan persampahan ini BKM Al-Ikhwan sendiri di dukung oleh RPLP(Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan

perkumuhan dan masalah persampahan. RPLP sendiri berisi tentang data mengenai masalah permukiman perkumuhan dan masalah sampah yang ada di Kelurahan Caile. Sebuah lembaga harusnya memiliki sebuah dokumen SOP (*Standard Operating Prosedure*), untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana dalam menjalankan berbagai kegiatan lembaga. SOP (*Standard Operating Prosedure*) ini akan memuat tahap prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap serta, dan susunannya. Dalam sebuah lembaga kelengkapan SOP (*Standard Operating Prosedure*) sangat dibutuhkan setiap anggota sebagai anggota BKM Al-Ikhwan sebagai bahan acuan dalam penanganan masalah persampahan dalam meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan.

KSM bersinar yang menangani masalah persampahan seharusnya lebih banyak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan masalah persampahan, kemudian melakukan survey kepada masyarakat mengenai apa-apa saja yang masalah yang dihadapi masyarakat mengenai masalah persampahan. Selain kepada masyarakat survey juga dilakukan kepada setiap anggota BKM Al-Ikhwan untuk merumuskan apa-apa saja kegiatan yang perlu dilakukan dalam penanganan masalah persampahan ini. Ini bisa menjadi sebagai dasar acuan penyusunan dan pembuatan SOP (*Standard Operating Produsedure*).

Pengawasan kinerja BKM dilakukan juga oleh askot mandiri yang menjadi mitra BKM Al-Ikhwan, dalam pengambilan sampah oleh petugas

sampah juga di bawah pengawasan oleh KSM. Dengan adanya pelatihan ini dapat menambah pengetahuan anggota BKM dalam menjalankan penanganan persampahan di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.

RPLP ini dapat dijadikan BKM sebagai bahan acuan atau petunjuk dalam penanganan masalah persampahan di Kelurahan Caile. RPLP juga mendukung atau bisa dikatakan sebagai faktor pendukung BKM dalam melaksanakan kegiatan masalah persampahan.

Asisten Kota Mandiri atau askot mandiri merupakan program dari KOTAKU (kota tanpa kumuh) Mandiri, ini juga merupakan alat bantu pengawasan BKM Al-Ikhwan dalam penanganan masalah persampahan di kelurahan Caile.

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 akses sanitasi layak. Program KOTAKU disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 yang bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak untuk di huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan kemiskinan.

Tujuan dari umum program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh

perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Ada 7 + 1 indikator sasaran yang ingin dicapai dalam program KOTAKU, yaitu (1) Bangunan Gedung (ketidakteraturan dalam dimensi, orientasi, dan bentuk; kepadatan tinggi tidaksesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang; ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan). (2) Jalan Lingkungan (kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman; lebar jalan yang tidak memadai; kelengkapan jalan yang tidak memadai). (3) Penyediaan Air Minum (ketidaktersediaan akses air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air setiap individu; tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan). (4)Draenase Lingkungan (ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan; menimbulkan bau; tidak terhubung dengan sistem draenase perkotaan). (5)Pengelolaan Air Limbah (ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah; ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku; tercemarnya lingkungan sekitar). (6)Pengelolaan Persampahan (ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; tercemarnya lingkungan sekitar sampah). (7)Pengamanan Kebakaran (ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadam yang memadai; ketidaktersediaan sistem pengamanan secara pasif dan aktif; ketidaksediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran). (8)Ruang Terbuka Publik (ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);

ketidak tersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka publik (RTP).

Berikut ini hasil wawancara dengan Lingkungan Caile, Yang membahas tentang kapasitas ketatalaksanaan:

“Penanganan persampahan ada strukturnya tersendiri, penanganan sampah organik dan penanganan sampah anorganik. Sampah organik yang terdiri dari daun-daun, ranting-ranting pohon, kayu yang sudah lapuk, dan sisa makanan rumah tangga dikelola menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik yang terdiri dari plastik, kertas, didaur ulang kembali menjadi kerajinan tangan (Hasil wawancara, HAR. 24 oktober 2018).”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BKM Al-Ikhwan dalam penanganan persampahan setiap struktur memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam penangan masalah persampahan BKM membentuk KSM, kemudian KSM inilah yang mengelola dan menangani masalah persampahan yang ada di Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba.

Sampah dalam penanganannya di bagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos yang bisa di gunakan masyarakat di bidang pertanian. Kemudian sampah anorganik dibuat menjadi kerajinan tangan. Ini menunjukkan pada pengembangan operasional ada produk yang dihasilkan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat pemilik sampah, yang membahas tentang kapasitas ketatalaksanaan:

“Sampah diangkut 3 kali dalam seminggu oleh petugas sampah dari pukul 10 pagi menggunakan motor, ada juga petugas sampah

yang tiap bulannya menagih iuran sampah, iuran sampah yang saya bayar itu Rp. 15.000,-Rp. 25.000,- per bulannya, tepatnya tanggal 10. Tapi masih ada sedikit masalah menurut saya karena pihak pelaksana belum mewajibkan semua warga untuk ikut pelayanan sampah ini karena masih ada tetangga saya yang masih membuang sampahnya sendiri di belakang rumahnya. BKM juga mengadakan kegiatan sosial untuk membantu warga Kelurahan Caile yang kurang mampu (Hasil Wawancara, NIS. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bagaimana proses pengangkutan sampah dari rumah warga hingga ada dari BKM yang menagih iuran sampah. Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa KSM Bersinar dalam penanganan masalah persampahan ini perlu lagi melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan persampahan ini. Sampah yang dibuang disembarang tempat dapat menimbulkan masalah yang serius, bisa menyebabkan banjir, sampah plastik yang tertimbun ditanah membutuhkan waktu yang lama dalam proses penguraian.

Untuk lebih meningkatkan lagi penanganan masalah persampahan seharusnya sampah diangkut 5 atau 4 kali dalam seminggu untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah persampahan ini. Selain menangani persampahan BKM juga melakukan kegiatan sosial. Ini menunjukkan bahwa kapasitas ketatalaksanaan BKM Al-ikhwan sudah sangat baik.

### **c. Struktur Organisasi**

Kapasitas struktur organisasi menjadi penunjang kekuatan sebuah organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat menjadi kekuatan bagi

organisasi dalam menghadapi perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Penguatan organisasi dapat dilihat pada struktur organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi menetapkan tujuannya dan menjalankan program kerjanya. Begitupun struktur organisasi BKM Al-Ikhwan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

Berikut ini hasil wawancara dengan staf DLHK, yang membahas tentang struktur organisasi:

“Tolok ukur kerjasama ini yaitu ada dua hal yang harus dilakukan BKM Al-Ikhwan. Pertama penanganan dan pengurangan sampah itu sendiri, salah satu pengurangannya adalah kalau makan secara prasmanan tidak menggunakan lagi kotak. Kedua penanganannya, sampah plastik(pipet, kantong) bisa didaur ulang. Serta persoalan ekonomisnya. Intinya bagaimana mengurangi dan menangani sampah itu sendiri. Ada bimtek(bimbingan teknologi) untuk semua anggota BKM(Hasil wawancara, RAM. 28 September 2018).”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BKM Al-Ikhwan bagaimana pun caranya harus menangani dan mengurangi sampah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi BKM itu sendiri. Peneliti juga melihat bahwa ada bimbingan teknologi yang dilakukan oleh LDHK untuk anggota BKM dalam penanganan masalah persampahan. Bimtek ini juga dapat dijadikan setiap anggota BKM sebagai bahan penguatan untuk struktur organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi.

Berikut ini hasil wawancara dengan Koordinator BKM Al-Ikhwan, yang membahas tentang kapasitas struktur organisasi:

“Di BKM Al-Ikhwan itu sendiri tidak ada yang namanya ketua. Ada 13 anggota BKM yang dibawah beberapa unit pimpinan



kolektif. Ada pengelola lingkungan, keuangan, sosial. Pengelola lingkungan sebagai pengawas kalau ada kegiatan lingkungan. Pengelola keuangan yang mengelola dana bergilir untuk warga miskin. Pengelola sosial yang mengelola kegiatan persampahan. Ada pelatihan BKM untuk setiap anggotanya, seperti pelatihan untuk pengelola keuangan, pengelola sosial, dan lingkungan, dan ada KSM yang dibentuk disetiap lingkungan. Ada juga pelatihan tentang dasar-dasar kepemimpinan, di organisasi kami memiliki visi dan misi. (Hasil wawancara, SYA. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan dalam menghadapi beberapa tantangan yang akan dihadapi BKM Al-Ikhwan, BKM melakukan pelatihan-pelatihan kepada setiap anggotanya. Ini menjadi bentuk dalam pengembangan kapasitas struktur organisasi. Dengan adanya pelatihan mengenai dasar kepemimpinan kepada anggota BKM menjadi pondasi dasar dalam penguatan kapasitas struktur organisasi.

Struktur organisasinya sudah terstruktur dimana dalam lembaga tersebut sudah terlihat bahwa ada pemisahan kegiatan beserta tugas dan fungsinya masing-masing, dalam BKM Al-Ikhwan juga ada koordinator sebagaimana sebagai pusat informasi untuk semua para anggota, dan ada pimpinan kolektif.

Pimpinan kolektif yang terdiri dari 13 orang perlu juga melakukan pengawasan serta evaluasi kepada setiap anggota setiap bulannya agar diketahui apa-apa saja yang menjadi kendala serta sudah sejauh mana penanganan masalah persampahan di kelurahan Caile.

Kolektif kolegial menjadi salah satu penunjang peningkatan struktur organisasi, dimana dalam BKM Al-Ikhwan itu sendiri tidak ada yang namanya ketua melainkan koordinator. Ini menunjukkan bahwa tidak

ada sekat didalam organisasi atau lembaga tersebut yang dapat merusak struktur organisasi.

Berikut ini hasil wawancara dengan Lingkungan Kelurahan Caile, yang membahas tentang struktur organisasi:

“Di BKM itu sendiri tidak ada yang namanya ketua tapi disebut sebagai koordinator, koordinator ini fungsi dan tugasnya sebagai sumber informasi bagi semua anggota BKM maupun yang menjadi mitranya. Di BKM juga ada yang namanya pimpinan kolektif yang terdiri dari 13 orang. Ada juga Unit pengelola lingkungan, pengelola keuangan, pengelola sosial dan ada juga yang namanya KSM yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Kami juga memiliki visi dan misi, visi kami adalah menuntaskan kemiskinan di Kelurahan Caile. Misi kami: (1)melakukan perubahan-perubahan yang ada di permukiman kumuh; (2)memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, berupa bantuan keterampilan serta memberikan bantuan kepada pemilik usaha kecil; (3)memberikan bantuan lingkungan kepada masyarakat, berupa bantuan perbaikan drainase, pembangunan jalan setapak; (4)memberikan bantuan ekonomi, berupa pemberian kredit makro kepada masyarakat miskin, memberikan mesin jahit dan mesin kepada kelompok usaha-usaha kecil. Serta tujuannya untuk meberdayakan masyarakat. (Hasil wawancara, HAR. 20 Oktober 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BKM Al-Ikhwan memiliki susunan struktur organisasi BKM Al-Ikhwan ini terstruktur dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pengembangan kapasitas struktur organisasi sangat penting dalam membangun kekuatan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh sebuah lembaga atau organisasi.

Hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa di BKM Al-Ikhwan ada bidang masing-masing yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pimpinan kolektif yang bertugas sebagai pengawas di setiap bidang-bidang, Unit Keuangan yang bertugas yang

mengelola keuangan, Unit Lingkungan yang mengelolah masalah lingkungan, Unit Sosial yang mengelolah masalah sosial, serta ada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

BKM Al-Ikhwan memiliki visi dan misi serta tujuan untuk memberdayakan masyarakat sebagai penguat dari kapasitas struktur organisasi. Visi dan misi ini sendiri berfungsi untuk mewujudkan cita-cita bersama, dorongan untuk selalu maju dan berkembang, untuk menghindari adanya perubahan haluan yang terlalu jauh dari tujuan yang hendak ingin dicapai, membantu sebuah lembaga untuk tetap tumbuh dan berkembang.

Penguatan sebuah struktur organisasi dapat adalah dimana ketua atau pimpinan selalu mengkoordinasi dan lembaga atau organisasi memiliki hak otonom dalam mengelolah lembanganya. Susunan struktur organisasi tersusun secara hirarki dari atas kebawah.

#### **d. Sistem Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat menandakan bahwa saling menghormati, saling percaya, dan saling menghargai antar sesama anggota maupun masyarakat, merupakan komitmen kerja yang bersifat jangka panjang. Komitmen kerja ini ditumbuhkembangkan dan dijaga oleh setiap anggota lembaga yang dapat menjalin hubungan yang harmonis.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Lurah Caile, yang membahas mengenai Sistem Pengambilan Keputusan:

“Dalam kegiatan persampahan aparat pemerintah setempat selalu terlibat, dalam pengambilan keputusan juga, selalu melibatkan

pemerintah, dan pasti selalu ada perwakilan dari masyarakat”. (Hasil wawancara, ALM. 27 September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem dalam mengambil keputusan BKM Al-Ikhwan selalu melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat. Sistem pengambilan keputusannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Koordinator BKM Al-Ikhwan, yang membahas tentang kapasitas sistem pengambilan keputusan:

“Tidak ada namanya ketua, tapi koordinator.BKM itu gotongroyong, disamping BKM melakukan kegiatan. Dalam setiap kegiatan persampahan itu setidaknya, tokoh masyarakat, tokoh agama harus melibatkan diri, dan pihak kelurahan selaku pemerintahan setempat, itu yang terlibat. Dalam pengambilan keputusan selalu musyawarah dan mufakat”. (Hasil wawancara, SYA. 2T September 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan BKM Al-Ikhwan selalu gotongroyong, karena disetiap kegiatannya selalu mengajak lapisan masyarakat untuk ikut bekrjasama. Dalam pengambilan keputusan selalu mendengarkan pendapat orang lain atau musyawarah mufakat.

Anngota BKM dalam setiap pengambilan keputusan selalu ikut andil dalam pengembailan keputusan, ini menunjukkan bahwa sistem kekeluargaan, musyawarah dan mufakat masih berlaku dalam BKM. Kapasitas pengambilan keputusan sudah cukup baik karena dilakukan secara bersama-sama.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Caile, yang membahas tentang sistem pengambilan keputusan:

“Semua kesepakatan yang dilakukan di BKM adalah hasil musyawarah dan mufakat. Apabila ada hasil kesepakatan yang dilakukan pimpinan kolektif, maka koordinator BKM lah yang menjadi penghubung yang memberi tahu kan kepada semua mitra BKM, begitupun sebaliknya (Hasil wawancara, HAR. 24 Oktober 2018).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau proses pencarian solusi dalam sebuah masalah lembaga selalu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Koordiator BKM sendiri bertugas sebagai pusat informas bagi seluruh anggota BKM maupun mitra BKM. Pengembangan kapasitas sistem pengambilan keputusan sudah cukup baik, karena setiap anggota bisa mengeluarkan pendapat serta sarannya masing dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses pencarian sebuah solusi dalam menghadapi sebuah masalah.

BKM Al-Ikhwan dalam pengambilan keputusan menggunakan sistem kolektif kolegial. Sistem kolektif kolegial ini adalah dimana dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya selalu memberlakukan suatu koordinasi dan saling membantu antara satu dan yang lainnya.

Kepemimpinan yang dianut oleh BKM Al-Ikhwan sendiri adalah kepemimpinan kolektif kolegial dimana disetiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah bersama-sama (kolektif) yang

mana dalam hal ini semua anggota dan pengurus harus ikut terlibat secara langsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis melihat ada beberapa hal yang telah dilakukan BKM Al-Ikhwan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, seperti pada aspek pengembangan kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana), pengembangan kapasitas ketatalaksanaan, pengembangan kapasitas struktur organisasi, dan pengembangan kapasitas sistem pengambilan keputusan:

1. Pengembangan Kapasitas SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana)  
Pengembangan SD (manusia, sarana dan prasarana, dan dana) sudah cukup baik. Dengan adanya bimtek atau bimbingan teknis kepada setiap anggota dapat menambah pengetahuan dalam penanganan masalah persampahan. Dengan adanya pengelolaan sampah menjadi kerajinan tangan dan dengan adanya bank sampah itu menandakan bahwa kapasitas manusia sudah cukup baik. Kapasitas sarana dan prasarana, dan dana juga sudah terpenuhi, seperti dinas LDHK menyediakan motor pengangkut sampah, karung untuk mengangkut sampah, dan menyediakan operator untuk motor sampah ini. Dengan adanya bank sampah juga menjadi sarana dalam penanganan masalah persampahan. BKM Al-ikhwan juga mendapatkan dana khibah dan iuran sampah dari masyarakat. Dalam penanganan sampah ini hampir semua

masyarakat merespon, walaupun masih ada masyarakat yang kurang peduli.

2. Pengembangan kapasitas ketatalaksanaan atau pengelolaan secara umum belum bisa dikatakan baik, karena BKM belum memiliki kelengkapan dokumen SOP (Standard Operating Procedure) yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menjalankan berbagai kegiatan BKM Al-Ikhwan. Namun, dalam penanganan persampahan BKM Al-Ikhwan memiliki nota kesepahaman atau dokumen perjanjian MOU (memorandum of understand) yang memiliki landasan hukum dalam penanganan masalah persampahan di kelurahan Caile. Perjanjian mengenai biaya retribusi sampah yang disepakati dalam dokumen perjanjian tidak sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan.
3. Pengembangan kapasitas struktur organisasi secara umum sudah baik. Karena dalam BKM Al-Ikhwan sendiri jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam BKM Al-Ikhwan sendiri ada koordinator, sekretaris, 13 pimpinan kolektif, Unit Pengembangan Sosial, Unit Pengembangan Lingkungan, Unit Pengembangan Keuangan, KSM, yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Pengembangan kapasitas sistem pengambilan keputusan sudah baik. Dalam setiap hal ini dalam mengambil keputusan BKM Al-Ikhwan selalu melibatkan setiap lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Caile, dan keputusan yang selalu diambil berdasarkan keputusan



bersama dengan cara musyawarah dan mufakat yang artinya menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolegial.

## **B. Saran**

1. Pengembangan kapasitas sumber daya, terkhusus lebih memaksimalkan sosialisasi terkait masalah penanganan persampahan kepada masyarakat. Pengadaan tempat sampah diberbagai titik keramaian, terkhusus di Jl. Kusuma bangsa. Sebaiknya sampah anorganik dan organik dipisahkan.
2. BKM Al-Ikhwan dalam pengembangan kapasitas ketatalaksanaan disarankan harus memiliki dokumen SOP (*Standard Operating procedure*) yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan mengenai penanganan persampahan. Koordinator dan pimpinan kolektif harus lebih meningkatkan lagi pengawasan dan evaluasi terhadap setiap anggota BKM Al-Ikhwan terkait mengenai masalah penanganan masalah persampahan di kelurahan caile, peneliti sendiri menemukan dilapangan biaya retribusi sampah tidak sinkron dengan apa yang disepakati dalam dokumen perjanjian antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak BKM Al-Ikhwan.
3. BKM Al-Ikhwan harus lebih meningkatkan lagi pengembangan kapasitas strukturnya agar mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga.

4. BKM Al-Ikhwan dalam pengembangan kapasitas pengambilan keputusan harus menjaga dan mempertahankannya sistem musyawarah dan mufakatnya dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8*, Nomor 2, Juli 2015(93-104) <http://ejurnal.untagsmd.ac.id> (diakses pada 13 Maret 2018)
- Almansri, M. N. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Dalam Pendidikan Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol.19, No.2 Juli -Desember 2016. (diakses pada 25 Desember 2018) <Http://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Arnold, R. 2016. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Prestasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Lampung. (Universitas Lampung) <http://digilib.unila.ac.id> (diakses 13 Maret 2018)
- Damanhuri, E. 2006. Teknologi Dan Pengelolaan Sampah Di Indonesia. Workshop Nasional Biokonversi Limbah 11-12 April 2006 – Univ. Brawijaya Malang <http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/> (diakses 13 Maret 2018)
- Damayanti, E, dkk. 2015. Strategi *Capacity Building* Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, 2015, Hal. 464-470 | 46 (diakses pada 04 Agustus 2018) <https://media.neliti.com>
- Dwiyanto, B. S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur* | Vol III No. 1 | Desember 2013 <https://www.researchgate.net/> (diakses 13 Maret 2018)
- Gammahendra, F. 2014. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*| Vol. 7 No. 2 Januari 2014| <administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. <https://media.neliti.com> (diakses pada 05 Desember 2018)
- Ginting, Y. 2012. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir). 106 | *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 No. 2 Juni 2012: 105–116 <http://binaprajajournal.com/> (diakses 13 Maret 2018)

- Hapsari, A. M. 2016. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Jepara. *Home > Volume 5*, Nomor 2, Tahun 2016  
<https://media.neliti.com/> (diakses 13 Maret 2018)
- Ilato, Rosman. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Junaidi. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. *Jurnal manajemen dan akuntansi* 2014.  
<https://www.neliti.com> (diakses pada 05 Desember 2018)
- Kalangi, R. 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015* 1.  
<https://media.neliti.com> (diakses pada 05 Desember 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id> (diakses pada 05 Desember 2018)
- Lestari, I. D. 2013. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podusugih, Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK Volume 2*, Nomor 1 2013 Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/> (diakses 13 Maret 2018)
- Mahyudin, R. P. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan* 3 (1), 66-74, 2017 <http://ppjp.unlam.ac.id/> (diakses 13 Maret 2018)
- Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO). <http://jurnal.dpr.go.id/> (diakses pada 05 April 2018)
- Ningsih, E. Dkk. 2017. Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Peluang Usaha Makanan Yang Tepat Menggunakan *Weighted Product (WP)* Berbasis WEB. *ILKOM Jurnal Ilmiah* Volume 9 Nomor 3 Desember 2017 Copyright © 2017 – ILKOM Jurnal Ilmiah -- All rights reserved | 244. [Jurnal.fikom.umi.ac.id](http://jurnal.fikom.umi.ac.id) (Diakses pada 05 Desember 2018)
- Prihantoro, A. 2012. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen (Studi Kasus Madrasah di Lingkungan Yayasan Salafiyah, Kajen, Margoyoso, Pati). *VALUE ADDED*, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012.  
<http://jurnal.unimus.ac.id> (diakses pada 05 Desember 2018)

- Rahayu, E.F. 2015. Manajemen Pembelajaran Dalam Rangka Pengembangan Kecerdasan Majemuk Peserta didik. *MANAJEMEN PENDIDIKAN VOLUME 24, NOMOR 5, MARET 2015*: 357-366. <https://www.scribd.com> (diakses pada 05 Desember 2018)
- Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 103-110. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/> (diakses 13 Maret 2018)
- Rusmasondi, J. R. 2017 . Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kakus RW 1, 2, Dan 12 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 6, No. 1 (2017) Tersedia online di: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/> (diakses pada 13 Maret 2018)
- Sari, N. (2014). Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 634-640. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id> (diakses pada 26 April 2018)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv)
- Supriyono, S. 2012. Sistem Penunjang Keputusan (SPK) Pemilihan Sepeda Motor Menggunakan AHP. *Vol 1,no. 1 (2012)*. <https://jurnal.umk.ac.id>. (diakses pada 05 Desember 2018)
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Prof. Dr. J. Salusu, MA.A. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan, Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

## Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

## LAMPIRAN



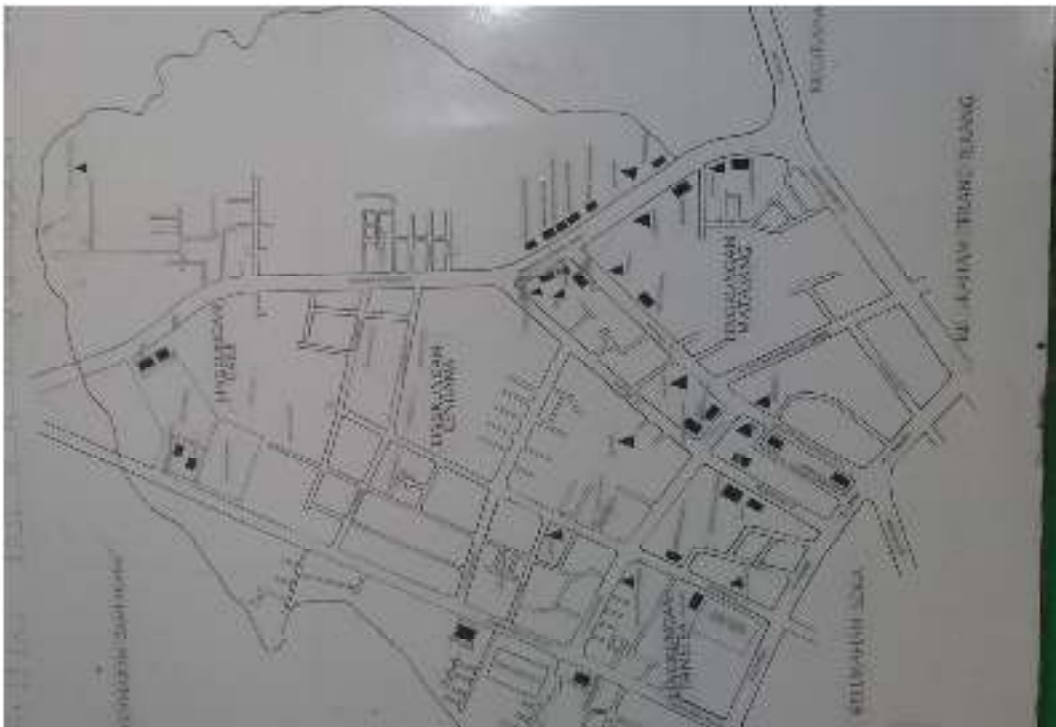
Wawancara dengan koordinator BKM al-Ikhwan



Wawancara dengan warga kelurahan Caile di Jl. Ahmad Yani



Wawancara dengan warga JL.Melati, Kelurahan Caile



Peta administrasi kelurahan Caile

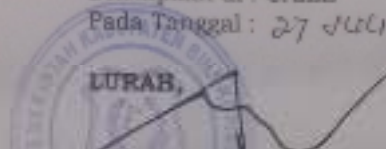


KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEPALA KELURAHAN CAILE  
SALMAH  
TANGGAL : 27 JULI 2018

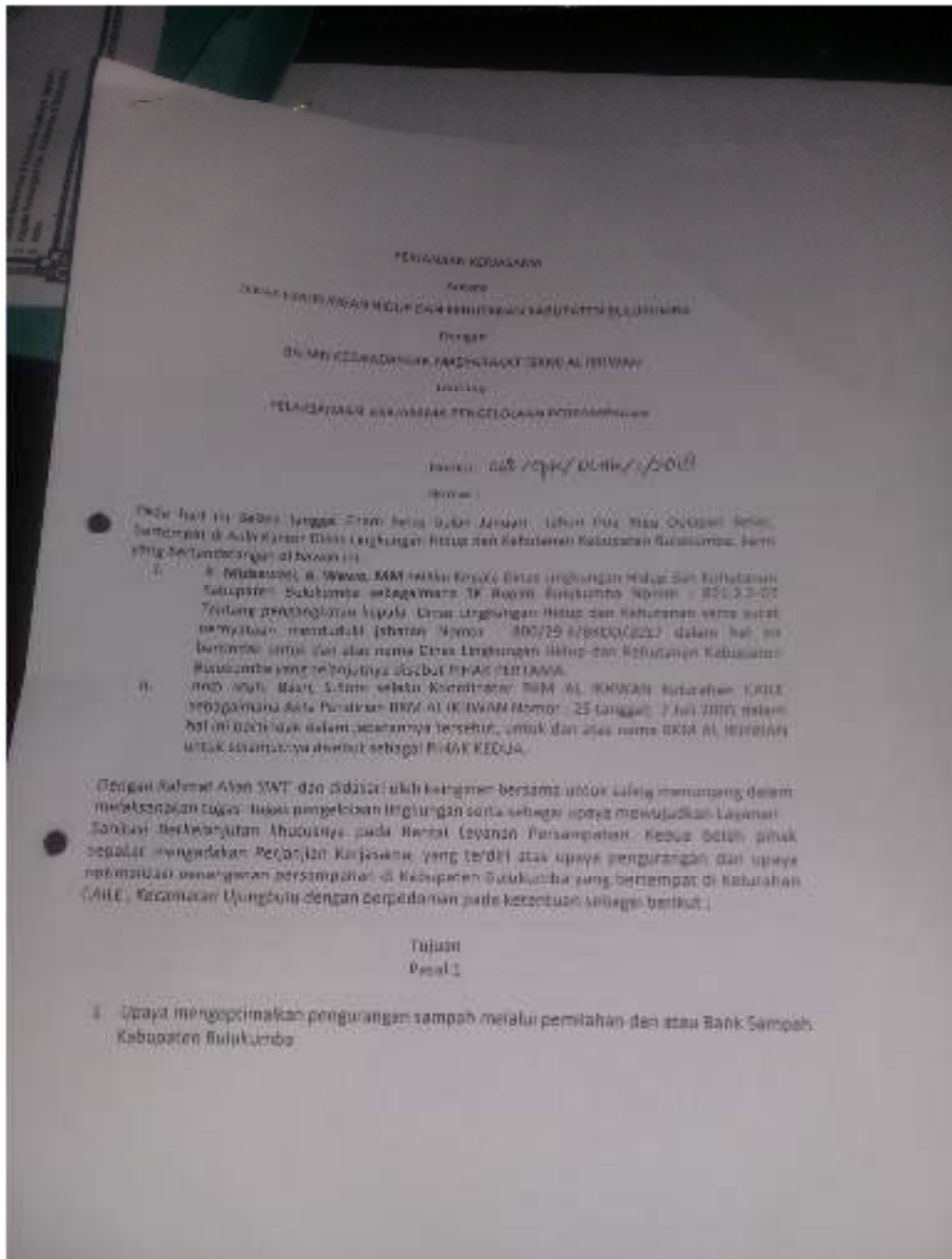
SUSUNAN KELEMBAGAAN BANK SAMPAH AL IKHWAN  
KELURAHAN CAILE KECAMATAN UJUNG BULU  
KABUPATEN BULUKUMBA



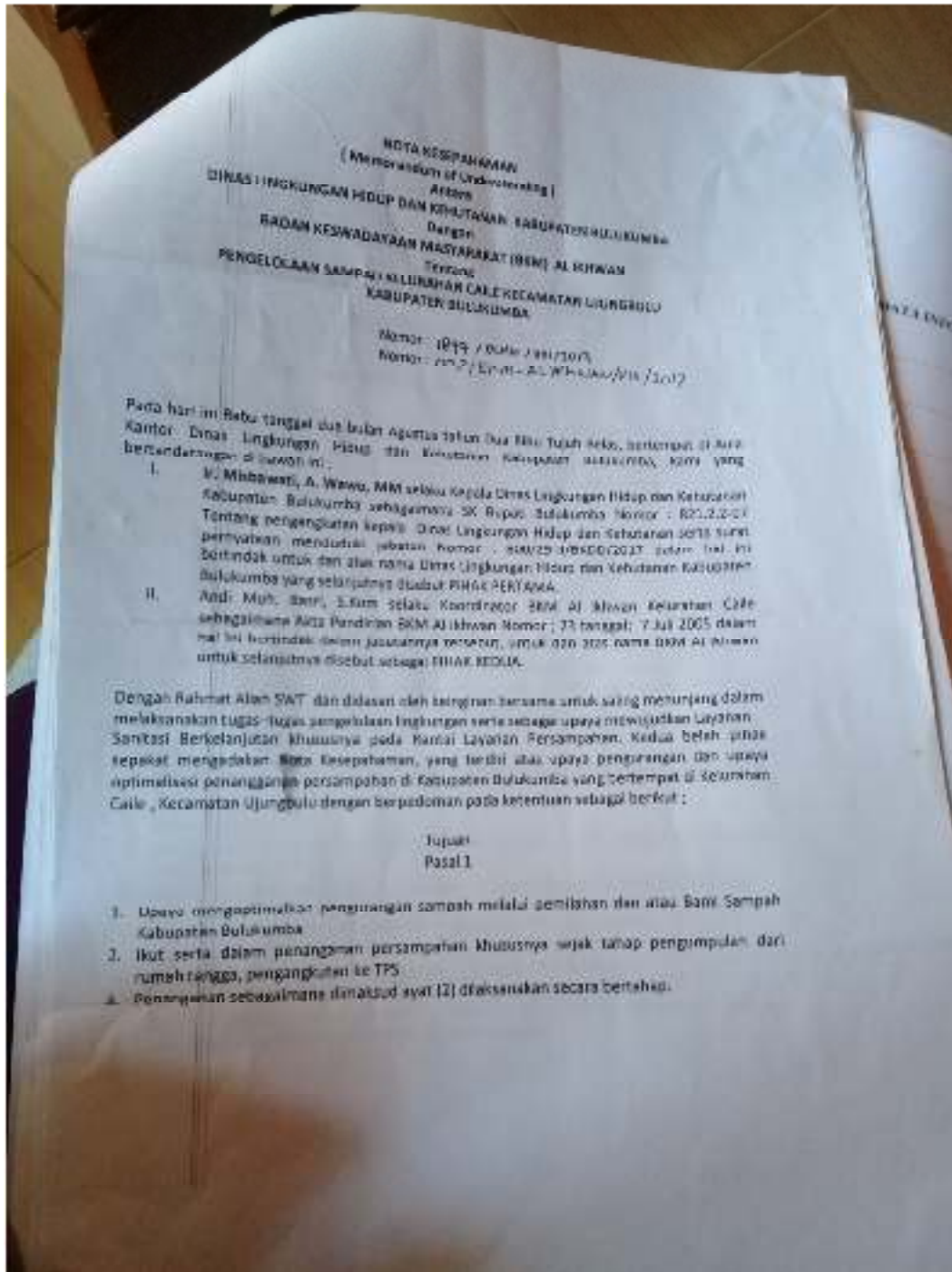
Ditetapkan di : CAILE  
Pada Tanggal : 27 Juli 2018



Susunan kelembagaan Bank Sampah BKM al-Ikhwan Kelurahan Caile



Perjanjian kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Bkm Al Ikhwan



Nota kesapahaman antara Dinas Lingkungan hidup Dengan Bkm.



Wawancara Dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Caile.



Sampah yang terlihat berceceran



Bank sampah BKM Al-Ikhwan